

Kode/nama Kluster	:	A4/ Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan Prodi
Tema Kajian	:	Isu Jenderr dan Keadilan

**LAPORAN**  
**PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/PEMBINAAN PRODI**



**AKSES PEREMPUAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM DI WILAYAH TAPAL KUDA**

**Oleh:**

Dr. Dyah Nawangsari, M. Ag      Ketua/ID Peneliti 201201730208443

Dr. H. Ubaidilah, M. Ag

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**AGUSTUS TAHUN 2020**

## HALAMAN IDENTITAS & PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Akses Perempuan Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Di Wilayah Tapal Kuda  
b. Jenis penelitian : Kualitatif  
c. Kategori Penelitian : Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan Prodi
  
2. Peneliti  
**Ketua tim**  
Nama lengkap : Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag  
NIP/NIDN : 197301122001122001  
Pangkat : IV b  
Jabatan : Lektor kepala  
Prodi/jurusan : PAI/Pascasarjana IAIN Jember  
  
**Anggota**  
Nama lengkap : Dr. Ubaidilah, M. Ag  
NIP/NIDN :  
Pangkat :  
Jabatan : Lektor kepala  
Prodi/jurusan : PAI/Pascasarjana IAIN Jember
  
3. Lokasi penelitian : Wilayah Tapal Kuda
  
4. Biaya : Rp. 6.000.000
  
5. Sumber dana : DIPA 2020

Jember, 8 Desember 2020

Menyetujui  
Ketua LP2M

Peneliti

Mustajab

Dyah Nawangsari

## **ABSTRAK**

**Judul:** Akses Perempuan Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Di Wilayah Tapal Kuda **Penulis:** Dyah Nawangsari, Ubaidillah

**Kata Kunci:** akses pendidikan, gender

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang akses perempuan dalam menempuh pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tentang prosentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masih sekolah menurut jenis kelamin sejak tahun 2011 sampai 2015, secara umum terlihat bahwa perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibanding laki-laki. Survei ini juga membuktikan bahwa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi ditemukan semakin banyak kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Studi ini berfokus pada partisipasi perempuan pada Perguruan Tinggi Islam, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Ma'had Aly di Jawa Timur. Untuk menganalisis fokus ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif gender. Untuk kelengkapan data peneliti mengadakan interview, observasi, yang dilengkapi dengan studi dokumen serta kajian pustaka. Selanjutnya guna menghindari bias dan menjamin keabsahan data yang diperoleh digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki, serta terdapat perbedaan tingkat partisipasi perempuan pada PTI dan PTKI dibandingkan pada Ma'had Aly.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah pada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Sebagai manusia biasa kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan laporan penelitian ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan laporan penelitian ini.

Dengan terselesainya pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan dorongan dalam upaya meningkatkan sumber daya tenaga pengajar di lingkungan IAIN Jember.
2. Semua fihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan penelitian ini.

Demikian semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri maupun fihak lain khususnya Civitas Akademika IAIN Jember, serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amien.

Jember, Nopember 2019

Penyusun

## TRANSLITERASI

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.		,		t{
2.		b		z}
3.		t		‘
4.		th		gh
5.		j		f
6.		h}		q
7.		kh		k
8.		d		l
9.		dh		m
10.		r		n
11.		z		w
12.		s		h
13.		sh		,
14.		s}		y
15.		d}		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) dengan cara menuliskan tanda coretan horizontal (*macron*) di atas huruf ا>i>dan u>( , dan ). Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf

“ay” dan “aw”, seperti *layyinah*, *lawwanah*. Kata yang berakhiran ta>marbutah dan berfungsi sebagai sifah (*modifier*) atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedang yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Identitas dan Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Transliterasi.....	v
Daftar Isi.....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Penelitian Terdahulu .....	4
E. Manfaat/kontribusi Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	9

### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

A. Islam dan Pendidikan Perempuan.....	11
B. Geneologi Segregasi Pendidikan Perempuan.....	16
C. Berbagai Kendala Akses Pendidikan Perempuan.....	22

<b>BAB</b>	<b>III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
		A. Lokasi Penelitian .....	24
		B. Pendekatan Penelitian .....	25
		C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
		D. Penentuan Informan.....	27
		E. Teknik Analisis Data.....	28
		F. Pengecekan Keabsahan Data.....	29
<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>PAPARAN DAN ANALISIS DATA</b>	
		A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam.....	31
		1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam.....	31
		2. Keberlangsungan Pendidikan Perempuan di Lembaga Pendidikan Tinggi	38
		B. Akses Perempuan terhadap Kegiatan Intra dan Ekstra Kampus.....	41
<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
		A. Kesimpulan.....	50
		B. Saran .....	51
		<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
		<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sudah sejak lama perempuan mengalami kendala akses dalam pendidikan. Bahkan sejak diperkenalkannya pendidikan formal di Indonesia oleh pemerintah Kolonial Belanda, kendala itu sudah sedemikian kuat terjadi. Saat itu pendidikan hanya di tujukan untuk perempuan-perempuan bangsawan, sehingga tertutup akses bagi perempuan lainnya. Bagi kebanyakan orang tua saat itu, pendidikan perempuan dimaksudkan untuk mempersiapkan peran perempuan sebagai ibu dan isteri, seperti yang dicontohkan oleh pola borjuis Belanda.<sup>1</sup> Perempuan dari kalangan bawah dianggap tidak perlu mengakses pendidikan karena tuntutan kerja keras, lebih memerlukan fisik ketimbang pikiran untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Warisan kolonial itu tentu saja sudah tidak berlaku lagi saat ini. Berbagai upaya pembangunan sudah dilakukan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi partisipasi perempuan dalam pendidikan. Upaya itu sudah menunjukkan hasil. Terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan dalam menempuh pendidikan dari tahun ke tahun. Peningkatan itu terjadi di semua jenjang pendidikan mulai Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai Perguruan Tinggi.

APM SD perempuan mengalami peningkatan dari 90,37% pada tahun 2011 menjadi 96,42% pada tahun 2015. APM SMP perempuan mencapai 79,21%

---

<sup>1</sup> M. Djajadiningrat-Nieuwenhuis, *Ibuisme and Priyayization: Part to Power*, In. E. Locher-Scolten & A. Niehof (Eds). *Indonesian Women in Focus*, (Dordrecht, The Netherlands: Foris Publication, Vol 127, 1987), 43-51.

dan sedikit menurun pada tahun 2015 menjadi 78,15%. Demikian pula dengan APM SMA perempuan meningkat dengan signifikan sebesar 60,52%. Walaupun APM di Perguruan Tinggi mengalami peningkatan, tetapi sedikit menurun di tahun 2015. Pencapaian tertinggi APM Perguruan Tinggi mencapai 20,60% pada tahun 2014 dan menurun pada tahun 2015 dengan mencapai sekitar 19,09%. Kenyataan ini membuktikan kesadaran perempuan untuk menempuh pendidikan cenderung meningkat setiap tahunnya.<sup>2</sup>

Meski APM perempuan dalam pendidikan cenderung mengalami peningkatan, masih belum bisa menghilangkan kesenjangan tingkat pendidikan antara laki-laki dengan perempuan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 menunjukkan prosentase perempuan dan laki-laki yang memiliki ijazah SD relatif setara. Sementara prosentase perempuan berusia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah berjumlah 21,51%. Jumlah tersebut jauh di atas laki-laki yang hanya berjumlah 15,51%. Namun kesenjangan semakin terlihat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan pada tahun yang sama. Kesenjangan pendidikan terlihat pada prosentase perempuan berusia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMA/SMK, sebesar 21,77%, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki sebesar 26,85%. Sedang untuk Perguruan Tinggi 7,98% untuk laki-laki dan 7,92% untuk perempuan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Perempuan Indonesia Tidak Lagi Miskin Ilmu*, Dipublikasikan Pada: Selasa, 25 April 2017, <https://www.kemenppa.go.id>

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Perempuan Indonesia Tidak Lagi Miskin Ilmu.....*, 15

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala-kendala bagi akses perempuan untuk melanjutkan pendidikan. Apalagi jika jenjang pendidikan itu semakin tinggi, maka bagi perempuan dibutuhkan tenaga dan perjuangan yang lebih berat untuk mampu bertahan dan bersaing dengan laki-laki. Oleh karenanya perempuan perlu diberi ruang untuk menyampaikan gagasan dan pengalamannya sendiri sebelum dan selama menempuh pendidikan. Maka dalam rangka memberi ruang bagi perempuan itulah penelitian ini dilakukan.

Pemilihan Perguruan Tinggi sebagai jenjang pendidikan yang di pilih, di dasarkan pada pertimbangan rendahnya partisipasi perempuan yang lulus SMA untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Secara umum Perguruan Tinggi (PT) dibagi menjadi dua, yakni Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan. Penelitian ini lebih memfokuskan kajian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dengan pertimbangan bahwa salah satu penyebab kendala akses perempuan adalah pembacaan terhadap Teks Suci (baik Al Qur'an maupun Hadits) yang cenderung *mysoginis*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Salah satu contoh nyata adalah refleksi Syeikh Nawawi, atas ayat al-Qur'an : "*Al-Rijal Qawwamun 'ala al-Nisa bi ma Faddhala Allah Ba'dhahum 'ala Ba'dh wa Bi Ma Anfaqu min Amwalihim*". (Q.S. Al-Nisa, [4]:34). Beliau menyatakan: "Laki-laki lebih unggul dari pada perempuan". Hal ini, dapat dilihat dari banyak segi, baik secara hakikat, maupun secara hukum agama (*syari'iyah*). Menurut hakikatnya, akal dan pengetahuan laki-laki lebih banyak, hati mereka lebih tabah dalam menanggung beban berat dan tubuh mereka lebih kuat. Oleh karena itulah, hanya kaum laki-laki yang menjadi nabi, ulama, pemimpin bangsa dan pemimpin shalat. Di samping itu, laki-lakilah yang diwajibkan jihad (perang), azan, khutbah, shalat Jum'at, kesaksian dalam pidana dan hukum kisas. Laki-laki juga mendapat bagian waris dua kali bagian perempuan. Hanya laki-laki pula yang memiliki hak mengawinkan, menceraikan dan poligami. Dan di pundak laki-lakilah kewajiban dan tanggungjawab atas mahar (mas kawin) dan nafkah keluarganya. Lihat: Muhammad B. Umar Nawawi al-Bantani, *Uqud al Lujai fi Bayan Huquq al Zaujain*, (berbagai edisi). Lihat juga tinjauan dan analisis hadits kitab ini oleh Forum Kajian Kitab Kuning, *Ta'liqwa Takhrij Syarh Uqud al Lujain*, tt. 38.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam memperoleh akses ke jenjang perguruan tinggi?
3. Bagaimana pengalaman perempuan dalam berpartisipasi di kegiatan intra maupun ekstra kampus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Partisipasi perempuan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi perempuan dalam memperoleh akses ke jenjang perguruan tinggi.
3. Pengalaman perempuan dalam berpartisipasi di kegiatan intra maupun ekstra kampus.

## **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Bagi kebanyakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, perempuan hampir selalu diposisikan sebagai “warga kelas dua”, sehingga hak-haknya sering diabaikan. Salah satunya hak perempuan terhadap pendidikan,

seringkali dihadapkan pada hambatan yang tidak sederhana. Itulah sebabnya Barat menyebut Perempuan Muslim sebagai *the other*. Anggapan ini semakin menguat pasca-peristiwa 9/11.<sup>5</sup> Perempuan Muslim dianggap tertindas oleh budaya dan harus diselamatkan.<sup>6</sup> .

Anggapan ini mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian terkait akses pendidikan bagi Perempuan Muslim. Di antaranya dilakukan oleh Sahu, Jeffery dan Nakkeeran yang menemukan bahwa Muslim dan Hindu di Bengaluru, India Selatan, mengalami hambatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Hambatan itu meliputi: finansial, keamanan di tempat umum, bias gender, isu-isu sosial dan dominasi keluarga dan masyarakat. Bagi Perempuan Muslim hambatan itu diperparah lagi dengan status mereka sebagai minoritas. Hal ini menunjukkan adanya hambatan *intersectional* yang kompleks (finansial, sosial, kultural, dan structural) bagi perempuan dalam mengakses Pendidikan Tinggi.<sup>7</sup>

Penelitian tentang akses perempuan terhadap pendidikan tinggi juga dilakukan oleh Alex Shams khusus untuk muslim Iran. Shams menemukan bahwa sejak revolusi Iran tahun 1979, perempuan secara berangsur memiliki keberanian untuk mempertanyakan bahkan memprotes pandangan-pandangan patriarkhis

---

<sup>5</sup> Ini adalah peristiwa pembajakan pesawat yang meruntuhkan menara kembar World Trade Center di kota New York, beserta serangkaian kejadian serupa lainnya pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa ini telah mengegerkan dunia dan menyisakan pandangan yang miring tentang Islam, dikarenakan adanya tuduhan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh sekelompok militan Muslim. Kejadian tersebut dikenal dengan peristiwa 11 September atau 11/9.

<sup>6</sup> Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa Islam adalah *a set of outdated traditions* atau seperangkat tradisi kuno, sehingga perlu dilakukan intervensi. (Lihat: Lila Abu-Lughod, *Do Muslim women really need saving?*, *American Anthropologist*, Vol. 104, No. 783, 2002, 90. Juga dalam Leila Ahmed: 1992; Mahmood: 2005).

<sup>7</sup> Biswamitra Sahu, Patricia Jeffery & N. Nakkeeran, *Barriers to Higher Education: Communalities and Contrasts in Experiences of Hindu and Muslim Young Women in Urban Bengaluru*, *Compare: a Journal of Comparative and International Education*, Vol. 47. No. 2, 2019, 177-191.

yang dibalut agama. Upaya ini membuahkan hasil berupa peningkatan akses perempuan dalam ruang publik, termasuk kesempatan dalam pekerjaan dan pendidikan. Bahkan sejak 2016 partisipasi perempuan muslim Iran di lembaga pendidikan tinggi mencapai 60%.<sup>8</sup> Meski begitu temuan Goli M Rezai-Rashti menegaskan bahwa akses perempuan terhadap pendidikan tidak berbanding lurus dengan akses terhadap kesempatan kerja. Sebab pada kenyataannya angka pengangguran perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.<sup>9</sup>

Perempuan muslim Arab Saudi juga mendapatkan hambatan dalam pendidikan. Penelitian Jamjoom dan Kelly menemukan fakta bahwa sebelum 1959, satu-satunya pilihan pendidikan yang ditawarkan untuk perempuan hanyalah pendidikan khusus di rumah (*Katatib*), atau di lembaga swasta yang memungkinkan perempuan untuk tetap menjaga semua identitas ke-Islam-annya. Perempuan di Arab Saudi mulai bisa mengakses Perguruan Tinggi pada tahun 1961/1962 dengan status sebagai '*irregular part time students*' di fakultas Seni dan Ilmu Administrasi King Saud University dengan representasi 5% dari keseluruhan mahasiswa. Pada tahun 1975, partisipasi perempuan meningkat menjadi 14% dari keseluruhan mahasiswa di Arab Saudi. Peningkatan pesat

---

<sup>8</sup> Alex Shams, Revolutionary Religiosity and Women's Access to Higher Education in the Islamic Republic of Iran, *Journal of Middle East Women Studies*, [March 2016: 12 (1)], 126-138.

<sup>9</sup> Goli M Rezai-Rashti, The Politics of Gender Segregation and Women's Access to Higher Education in the Islamic Republic of Iran: the Interplay of Repression and Resistance, *Gender and Education*, [2015, 27 (5)], 469-486.

terjadi antara tahun 1990 sampai 2004 sebesar 51,2%. Berikutnya di tahun 2013, perempuan mencapai 60% dari keseluruhan mahasiswa di negara tersebut.<sup>10</sup>

Beberapa penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya memberikan gambaran tentang hambatan-hambatan akses pendidikan perempuan di wilayah Timur. Penelitian tentang komunitas Muslim minoritas di Barat dilakukan oleh Silverman, terhadap perempuan Muslim Romania di New York.<sup>11</sup> Temuan penelitian ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi dalam pendidikan perempuan Romania lebih tinggi dari pada laki-laki. Motivasi utama orang tua menyekolahkan anak perempuan mereka adalah untuk memperoleh pekerjaan, dan penghidupan yang layak.

Meski demikian bukan berarti pendidikan perempuan muslim Romania tanpa mengalami hambatan. Hambatan utamanya dalam hal mobilitas dan seksualitas para perempuan itu. Sebagai masyarakat pendatang, mereka dituntut untuk mempertahankan dan melestarikan budaya dan tradisi dari leluhur mereka. Tuntutan ini lebih banyak dibebankan kepada perempuan, sebab perempuan yang melahirkan generasi penerus para imigran itu. Itulah sebabnya para orang tua melarang anak perempuannya bergaul dengan warga non-Romania. Hal ini berdampak pada sempitnya ruang gerak perempuan dalam belajar. Di sisi lain status perempuan sebagai komunitas diaspora menjadikan mereka rawan sekali

---

<sup>10</sup> Janjoom, dan Kelly, Higher education for women in Saud Arabia, dalam Larry Smith dan Abdurrahman Abouammoh (editors), *Higher Education in Saudi Arabia: Achievements, Challenges and Opportunities*, (New York: Springer, 2013).

<sup>11</sup> Komunitas ini merupakan generasi kedua para imigran dari Romania. Generasi pertama diperkirakan masuk ke Amerika antara tahun 1871 sampai 1960, dan bahkan masih berlanjut hingga hari ini. Kepercayaan yang mereka anut mayirota Kristen, tetapi sebagian juga penganut Yahudi dan Islam. Mereka dikenal dengan komunitas Diaspora Romania, sebab mereka lahir dan berdarah Romania tetapi menetap di Amerika.



menjadi korban kejahatan seksual dari masyarakat Non-Romani. Kenyataan ini juga menjadi kendala akses pendidikan perempuan.<sup>12</sup>

Berbagai penelitian yang telah diuraikan menggambarkan tentang kendala-kendala akses bagi pendidikan Perempuan Muslim baik di wilayah Timur dengan latar belakang Islam maupun di wilayah Barat yang non Islam. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim juga menarik perhatian para peneliti. Di antaranya dilakukan oleh Djajadiningrat-Nieuwenhuis yang meneliti pendidikan perempuan dari masa ke masa. Salah satu temuan dalam penelitian ini bahwa pendidikan perempuan di era Orde Baru, (1966-1998) ditujukan untuk mendukung peran sebagai ibu. Selain itu perempuan diharapkan memberi dukungan dalam pembangunan bangsa, menjadi ibu bangsa, atau *the mother of the nation*. Hal ini terkait anggapan bahwa perempuan yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan baik bagi keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Oleh Djajadiningrat-Nieuwenhuis fenomena ini disebut dengan istilah *Ibuism*.<sup>13</sup>

Pola pikir *Ibuism* ini masih dipegang kuat oleh masyarakat Indonesia. Tetapi apakah pendidikan perempuan Muslim di Indonesia masih terkendala oleh pola pikir ini? Selain kendala pola pikir masyarakat, apakah ada kendala lain yang di hadapi perempuan dalam mengakses pendidikan? Apakah ada regulasi-regulasi yang juga turut memberi kontribusi terhadap kendala tersebut? Berbagai

---

<sup>12</sup> Carol Silverman, Education Agency and Power Among Macedonia Muslim Romani Women in New York City, *Signs*, Vol. 38, No. 1, September 2012, 30-36.

<sup>13</sup> M. Djajadiningrat-Nieuwenhuis, *Ibuisme and Priyayization:.....*, 43-51. Kesimpulan yang sama juga diungkapkan oleh Suryakusuma (2011).

pertanyaan itu tentu membutuhkan jawaban yang tidak sederhana. Maka untuk kepentingan itulah penelitian ini sangat penting dilakukan.

#### **E. Manfaat/Kontribusi Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan akses perempuan dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Adapun secara praktis manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan informasi bagi pemerintah tentang implementasi Pengarus Utamaan Gender di Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam khususnya dalam hal akses perempuan di Pendidikan tinggi Islam.
2. Memberikan informasi bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tentang potret pendidikan perempuan di Perguruan Tinggi, sebagai bahan untuk mengembangkan pendidikan yang responsif gender.
3. Sebagai acuan bagi praktisi pendidikan untuk mengembangkan pendidikan yang responsif gender.

#### **F. Sistematika pembahasan**

Penelitian ini disajikan dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memberikan deskripsi mengenai latar belakang yang mendasari munculnya penelitian dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan penelitian dilakukan. Selanjutnya dijelaskan posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian sejenis, sehingga diharapkan dapat menghindari adanya tumpang tindih dengan penelitian sebelumnya. Pada bab ini dibahas pula

mengenai manfaat penelitian baik bagi secara teoritis bagi pengembangan keilmuan maupun manfaat secara praktis.

Bab kedua merupakan uraian konsep yang sangat penting untuk dijadikan landasan teori dalam penelitian ini. Konsep-konsep itu antara lain: (1) Islam dan Pendidikan Perempuan dan (2) Berbagai Kendala Akses Pendidikan Perempuan. Bab ketiga laporan penelitian ini berisi tentang metode penelitian yang membahas tentang pendekatan (*Research Methode*) yang dipakai dalam penelitian ini. Sehubungan dengan pendekatan penelitian, maka didalamnya juga dipaparkan teknik-teknik penggalan dan analisis data, termasuk juga alat uji validitas datanya. Selanjutnya paparan dan analisis data disajikan pada bab keempat. Adapun Bab kelima penutup, yang berisi kesimpulan dan saran, merupakan bagian paling akhir dari laporan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Islam dan Pendidikan Perempuan

Pendidikan dapat ditinjau dari dua segi, Pertama dari sudut pandangan masyarakat, dan kedua dari segi pandangan individu. Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan berarti pewarisan nilai-nilai budaya dari satu generasi kepada generasi lain agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara. Adapun dari sudut pandang individu pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam sehingga mampu berkembang seoptimal mungkin. Upaya pengembangan potensi individu itu sendiri menjadi hak setiap orang tanpa mengenal perbedaan. Dalam banyak ayat Al Qura'an dan Hadits Islam sangat menekankan hak bahkan kewajiban bagi seluruh umatnya guna memperoleh pendidikan.<sup>1</sup>

Praktik pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pendidikan bagi umat manusia sesungguhnya telah tersirat dalam kehidupan Rasulullah yang dituangkan dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut pada intinya menggarisbawahi lima hal pokok sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, prinsip persaudaraan yang menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu asal, oleh karenanya mereka bersaudara. *Kedua*, prinsip saling menolong dan melindungi

---

<sup>2</sup> Diantara ayat-ayat itu dalam surat Al Alaq (96): ayat 55, Al Mujadalah (58): ayat 11, lihat DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 1997). Hadits yang populer tentang perintah menuntut ilmu diantaranya adalah:

عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ مَاجِهَ، حَدِيثٌ 220 )

Lihat: Al Khafid Abi 'Abdillah Muhammad bin Yajid Al Qozwini, Sunan Ibnu Majah. (Dar Ikhyah' Al Kutub al 'Arabiyah: Tt), 260.

penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan bahasa harus saling membantu dalam menghadapi lawan. *Ketiga*, prinsip melindungi yang lemah dan teraniaya. *Keempat*, prinsip saling menasehati, dan *kelima*, prinsip kebebasan beragama. Ketercapaian kehidupan umat yang madani yang ditekankan oleh Rasulullah pada saat itu tidak mungkin dapat tercapai jika tidak mempunyai ilmu pengetahuan, yaitu dengan memfungsikan dan mengoptimalkan potensi akal melalui pendidikan.<sup>2</sup>

Islam dalam segenap ajarannya bersifat egaliter, sebab manusia di pandang memiliki kesatuan asal sehingga tidak ada kompromi terhadap berbagai bentuk diskriminasi baik dalam jenis kelamin, kedudukan sosial dan bangsa, suku warna kulit dan ras. Paling tidak ada empat ayat Al Qur'an yang menyatakan secara tegas akan kesatuan asal usul manusia, yakni dalam surat An-Nisa' ayat 1, Al An'am ayat 98, Al A'raf ayat 189, dan Az Zumar ayat 6. Allah menegaskan bahwa manusia apa pun jenisnya berasal dari asal yang sama, sebagaimana dalam Surat An-Nisa' ayat 1 yang artinya sebagai berikut:

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi dan menjaga kamu."<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi, dalam Imam Machali, Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan, *Media pendidikan*, 27 (1) 2013, 17.

<sup>3</sup> Lihat DEPAG RI, *Al Qur'an .....*, hal. 114

Penegasan ayat tersebut beserta tiga ayat lainnya membawa kepada konsep humanisme universal yang menentang segala bentuk diskriminasi terhadap umat manusia.<sup>4</sup> Al Qur'an dalam konteks penciptaan manusia selalu berbicara dengan istilah-istilah yang sepenuhnya egaliter. Bukti egalitarianisme Islam lainnya dinyatakan secara tegas dalam Surat Al Ahzab ayat 35, yang artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas nampak sekali bahwa egalitarianisme dalam Islam merupakan sebuah elemen yang konsisten dalam berbagai penuturan Al Qur'an. Di antara berbagai ciri luar biasa Al Qur'an, khususnya bila dibandingkan dengan teks-teks kitab suci dalam tradisi-tradisi monotheistik lainnya, adalah bahwa perempuan diseru secara eksplisit, yang menegaskan persamaan secara moral dan spiritual yang mutlak antara pria dan wanita. Prinsip persamaan ini tentu saja juga berlaku dalam persoalan hak untuk memperoleh pendidikan.

---

<sup>4</sup> Menarik untuk dicermati bahwa pengungkapan kata ciptaan pertama (*nafs in wahidatin*) tidak ada pernyataan apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai menegaskan atau mengemukakan bahwa laki-laki diciptakan sebelum perempuan yang berakibat bahwa yang satu lebih utama dari pada yang lain. Analisis deskripsi-deskripsi Al Qur'an tentang penciptaan manusia menunjukkan bahwa Al Qur'an dengan tidak berat sebelah menggunakan kata-kata dan citra feminim dan maskulin untuk menciptakan manusia dari suatu sumber tunggal. Lihat: Riffat Hassan dalam Jeanne Becher, *Perempuan Agama & Seksualitas Studi Tentang Pengaruh Berbagai Ajaran Agama Terhadap Perempuan*, Jakarta: Gunung Mulia,

<sup>5</sup> DEPAG RI, *Al Qur'an .....*, hal. 675

Satu hal yang patut diberikan penekanan bahwa ayat 35 surat Al Ahzab di atas diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan kaum wanita kepada Rasulullah, tentang Al Qur'an yang selalu menyeru hanya kaum pria dan pada saat yang sama kaum wanita harus memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ayat 35 surat Al Ahzab di atas secara eksplisit menyeru kepada pria dan wanita, suatu tanggapan yang menunjukkan kesediaan Rasulullah (dan Allah) untuk mendengar aspirasi wanita. Setelah ayat tersebut Al Qur'an secara eksplisit menyeru kaum wanita beberapa kali.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian ayat di atas terbukti bahwa Islam memberi peluang yang sama bagi penganutnya untuk mengakses informasi dari Al Qur'an dan pada saat yang sama juga menjalankan perintah-perintah yang terkandung dalam Al Qur'an. Dengan demikian setiap orang tanpa memandang jenis kelamin maupun perbedaan-perbedaan lain berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Gambaran masyarakat muslim kurun awal semakin menegaskan prinsip egalitarian Islam dalam hal menuntut ilmu. Secara umum masyarakat muslim kurun awal menunjukkan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu pengetahuan. Rasulullah memberikan perhatian yang sama besar bagi pengikutnya dalam menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagai agama yang *Rahmatan li al `a>lamin* Islam memandang seluruh umatnya dengan cara pandang yang sama tanpa mengenal diskriminasi dalam bentuk apa pun. Termasuk dalam meraih pengetahuan, sejak awal Islam memberi peluang yang sama bagi umatnya, sebab pendidikan bukan saja menjadi hak

---

<sup>6</sup> Ahmed, *Wanita*....., hal. 88

melainkan kewajiban bagi seluruh umat Islam tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu praktik-praktik pendidikan yang masih diskriminatif sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan spirit ajaran Islam yang egaliter.

Walaupun Islam menegaskan tentang hak—bahkan kewajiban—bagi siapa pun untuk menempuh pendidikan tanpa ada diskriminasi, pada kenyataannya masih ada pihak-pihak yang diposisikan lemah yang paling banyak terhambat untuk memperoleh pendidikan. Perempuan misalnya, karena posisi sosialnya dilemahkan memperoleh kesempatan yang relatif lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Pesan ideal Islam tentang kesetaraan ini mengalami pergeseran seiring perkembangan sejarah kaum muslimin.

Belakangan justru kaum perempuan dimasukkan kembali ke dalam kerangkeng-kerangkeng rumahnya. Aktivitas intelektual dibatasi, kerja-kerja sosial, politik, dan kebudayaan mereka dipasung. Perempuan-perempuan Islam tenggelam dalam timbunan pergumulan sejarah. Mereka dilupakan dan dipinggirkan (*al-muhammasyat*) dari dialektika social, budaya, dan politik. Sistem sosial *patriarkhis* kembali begitu dominan. Keikutsertaan atau keterlibatan kaum perempuan dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, baik sebagai pelajar maupun guru, dipandang mereka dapat menimbulkan fitnah dan *inhiraf* (penyimpangan) moral.<sup>7</sup>

Pandangan ini menjadikan pendidikan perempuan mengalami degradasi yang sangat tajam. Baru pada abad ke 19 sejumlah tokoh tampil untuk menyerukan dibukanya pendidikan bagi kaum perempuan. Rifa'ah Rafi' al-

---

<sup>7</sup> Husain Muhammad, *Islam dan Pendidikan Perempuan*, Jurnal Pendidikan Islam, volume III, nomor 2, Desember 2014/1436, 240.



Thahthawi (1801-1873 M) dipandang sebagai orang pertama yang mengkampanyekan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu juga menyerukan dibukanya akses pendidikan yang sama bagi kaum perempuan. Khusus di Indonesia perempuan baru mendapat posisi yang setara dalam pendidikan pesantren di awal abad ke 20.<sup>8</sup> Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa baru saat itulah perempuan diberi hak yang sama untuk menempuh pendidikan, meskipun pesantren telah berkembang di Indonesia sejak berabad-abad sebelumnya.<sup>9</sup>

## **B. Geneologi Segregasi Pendidikan Perempuan**

Diskriminasi dalam pelaksanaan pendidikan sebenarnya tidak memiliki akar geneologi sejarah pada zaman Nabi. Dalam kehidupan masyarakat pada kurun awal perkembangan Islam Nabi memberikan ilmu pengetahuan kepada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Wanita-wanita dalam masyarakat muslim kala itu datang ke masjid, berperan dalam ibadah-ibadah keagamaan pada hari-hari besar, dan mendengarkan ceramah-ceramah Rasulullah. Mereka bukanlah pengikut yang pasif dan penurut, melainkan mitra bicara yang aktif dalam berbagai masalah termasuk masalah keagamaan. Tidak ada indikasi yang

---

<sup>8</sup> Sejak akhir tahun 1910 para Kyai telah menyediakan kompleks pesantren untuk murid-murid perempuan, Pesantren Denanyar di daerah Jombang yang pertama kali membuka pesantren perempuan. Kemudian tahun 1920-an beberapa pesantren lain di antaranya Pesantren Tebuireng di Jombang dan Pesantren Singosari Malang, juga membuka pesantren perempuan. Lihat: Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 54.

<sup>9</sup> Diantara pesantren yang telah berkembang selama berabad-abad adalah Pesantren Salafiah Darus Salihin yang terletak di Tempelsari, Maduretno Kalijajar Jawa Timur yang didirikan pada tahun 1364, Pasantren Al Kahfi di Kebumen Jawa tengah pada tahun 1600, dan Pesantren Darul Muttaqin di Losari Jetis Jawa Tengah, didirikan pada tahun 1648. Lihat: Muh Said, Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*, (Bandung: Jemmars, 1987), 85.

menyebutkan bahwa ada diskriminasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pengajaran Rasul.<sup>10</sup>

Partisipasi leluasa dalam berbagai urusan kemasyarakatan seperti ini segera dibatasi dengan diperkenalkannya pemingitan secara formal. Kehidupan istri-istri Rasul adalah yang pertama kali dibatasi, dan semasa hidup Rasulullah ayat-ayat yang memerintahkan penghijaban atau pemingitan diberlakukan atas mereka. Teks-teks awal merekam berbagai peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat yang melembagakan pemingitan istri-istri Nabi. Pesta pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy menurut sebuah riwayat, merupakan peristiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat tentang *hijab* (penutup).<sup>11</sup>

Dalam peristiwa lain Aisyah menuturkan bahwa Umar bin Khatab pernah mendesak Rasulullah memingit istrinya karena banyak orang datang ke masjid, padahal kediaman Rasulullah dengan para istrinya menjadi satu bagian dengan

---

<sup>10</sup> Pada masa awal dakwah Rasulullah perempuan-perempuan muslim selalu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai urusan kemasyarakatan bahkan kisah tentang perang uhud menggambarkan kaum wanita termasuk istri-istri Nabi secara aktif dan bebas berpartisipasi dalam medan perang kaum laki-laki. Mereka juga merawat para pejuang yang terluka dan memindahkan kaum pria yang terluka atau gugur di medan perang. Lihat: Laila Ahmed, ***Wanita dan Gender dalam Islam Akar Historis perdebatan Moderan***. Terjemahan: M.S. Nasrulloh, Jakarta: Lentera, 2000, hal. 62.

<sup>11</sup> Ahmed, 2000: 63. Diceritakan bahwa dalam pesta perjamuan makan itu beberapa sahabat menunggu hidangannya masak sambil berbincang-bincang dengan istri-istri Nabi yang lain, hal ini membuat Nabi merasa terganggu sehingga turunkan ayat 53 surat Al Ahzab yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diijinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masakannya (makanan), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan maka keluarlah tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagimu dan hati mereka."* ***Ibid***, hal. 62.

masjid tersebut. Masjid sekaligus menjadi tempat Nabi menjalankan segenap aktifitas keagamaan dan kemasyarakatan. Di masjid juga Nabi menerima para pemimpin sebuah kabilah yang belum memeluk Islam, dengan mendirikan tiga tenda untuk mereka di halaman masjid selama perundingan berlangsung. Berbagai utusan dari kabilah lain juga hadir ke tempat itu untuk menemui Rasulullah. Para pemimpin Madinah menghabiskan malam hari di tempat itu sesudah mengikuti pertempuran. Sampai pada suatu ketika Umar ibn al Khattab pernah mengenali istri Nabi (Sawda dan 'Aisyah) yang keluar untuk suatu keperluan. Sehingga Umar merasa perlu mengusulkan kepada Nabi agar istri-istrinya dipingit guna melindungi mereka dari pelecehan dan penghinaan orang-orang munafik.<sup>12</sup> Peristiwa itulah yang kemudian menyebabkan turunnya ayat 59 surat Al Ahzab yang artinya:

*"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: 'hendaklah mereka mengulurkan ke suluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, karena itu mereka tidak mudah diganggu. Dan Allah adalah Maha pengasih lagi Maha Penyayang"*.

Banyaknya orang yang datang dan mengharapkan kebaikan dari Nabi di tempat kediaman istri-istri Nabi, menjadi alasan utama dilembagakannya hijab (pemingitan) bagi para istri Nabi, serta berbagai aturan dalam berkomunikasi dengan mereka. Dengan demikian Rasulullah menciptakan jarak yang sesuai bagi istri-istri beliau dengan masyarakat yang bergerombol di depan rumah mereka. Dapat dikatakan pemisahan itu lebih banyak didorong oleh alasan kesopanan, yang kemudian mendapat legitimasi dari Al Qur'an. Ketika Al Qur'an menegaskan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 64

bahwa istri-istri Nabi ketika berbicara dengan pria lain harus berada dibalik pemisah (hijab), sekali lagi karena alasan kesopanan. Pertanyaan kemudian adalah: Apakah pemisahan tersebut juga berlaku bagi seluruh wanita muslimah?

Sejarah membuktikan bahwa semasa hidup Rasulullah hijab hanya diberlakukan khusus untuk istri-istri Nabi, sehingga pada saat itu perempuan masih dapat berpartisipasi secara aktif dalam segala hal. Akan tetapi dalam komunitas muslim awal ayat-ayat tersebut dibesar-besarkan dan ide-ide dasarnya dielaborasi dan didefinisikan dengan cara yang secara cepat membawa kepada pengasingan wanita yang terasa aneh dibandingkan dengan yang dimaksudkan Al Qur'an dan diharapkan oleh Nabi.<sup>13</sup> Hijab yang semula dikhususkan bagi istri Nabi menjadi praktik yang secara umum dilakukan dalam kehidupan perempuan ketika itu, dan masih berlanjut di berbagai negara Islam hingga sekarang.

Praktik pemakaian hijab sendiri dimulai semenjak penaklukan awal, ketika kaum muslim mengadakan kontak dengan Bizantium. Pada saat itu pemakaian hijab dalam bentuk cadar telah dijalankan di beberapa tempat seperti Syria, Irak dan Persia dan diadopsi ke dalam Islam khususnya bagi perempuan kota dan kelas atas. Tidaklah diketahui bagaimana adat istiadat itu menyebar ke masyarakat. Berbagai penaklukan oleh kaum muslim atas wilayah-wilayah dimana hijab lazim berlaku di kalangan masyarakat kelas atas, arus deras kekayaan, meningkatnya status orang-orang Arab, dan istri-istri Nabi yang

---

<sup>13</sup> Sharma Arvind, *Perempuan dalam Agama-agama Dunia*, Terjemahan: Ade Alimah, Yogyakarta: SUKA-Press, 2006, hal. 338.

dijadikan sebagai model mungkin bergabung dan menyebabkan mereka mengadopsinya secara umum<sup>14</sup>.

Kemudian sejak masa-masa awal pertumbuhan kerajaan muslim, pemakaian cadar dan pengasingan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan perempuan kelas atas, sebab bagi masyarakat pedesaan hijab tidak berlaku secara umum. Ini dikarenakan mereka tidak berhadapan dengan orang-orang asing dalam lingkungan tersebut, dan karena hijab justru akan menghalangi mereka dari berbagai jenis pekerjaan yang melibatkan mereka secara tradisional.<sup>15</sup> Bagaimana pun kondisi ini mengakibatkan perempuan menjadi terisolir, apalagi dengan adanya hadits yang menerangkan bahwa perempuan lebih baik beribadah di rumah daripada di masjid dan lebih baik beribadah di kamar pribadinya sendiri.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar dalam memandang perempuan dan gender pada masyarakat Abbasiyah dengan masyarakat Islam kurun awal. Secara garis besar perbedaan itu antara lain: *Pertama*: Nabi Muhammad dan masyarakat Islam kurun awal menyuarakan agama dalam konteks sikap yang jauh lebih positif pada wanita, ketimbang masyarakat Abbasiyah yang memiliki kecenderungan androsentris dari berbagai praktik Islam.

*Kedua*: Akibat kecenderungan androsentris pada masa Abbasiyah maka suara agama yang secara spiritual egaliter akan sulit didengar, ini jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan masyarakat Islam kurun awal yang melibatkan perempuan dalam segala urusan bahkan dalam perang sekalipun. Bagi kaum elit

---

<sup>14</sup> Ahmed, *Wanita....*, hal. 66

<sup>15</sup> Sharma, *Perempuan....*, hal. 338-339.

Abbasiyah wanita mereka miliki dalam hubungan antara tuan dengan budak, sehingga pada tataran implisit dan seringkali eksplisit kata-kata *wanita*, *budak*, dan *obyek bagi pemuasan seksual* berdekatan dan melebur sehingga tidak bisa dipisahkan. Ironisnya dalam kondisi seperti itulah doktrin-doktrin *fiqhiyah* (hukum Islam) mengenai laki-laki dan perempuan mulai terumuskan secara lebih mapan oleh para fuqaha>(ahli hukum) beberapa abad sepeninggal Nabi. Pada saat itulah batas-batas tentang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan terumuskan. Tidak bisa dipungkiri pandangan masyarakat tentang perempuan dan gender pada waktu itu sangat berpengaruh pada perumusan hukum yang berlaku kemudian.<sup>16</sup>

Kondisi perempuan yang sudah termarginalkan akibat penerapan hijab dan pemingitan, mendapat legitimasi dengan adanya produk-produk hukum yang semakin memposisikan perempuan sebagai *the second class*. Hadits-hadits yang "memojokkan" perempuan misalnya penghuni neraka kebanyakan perempuan, perempuan kurang akalunya, perempuan kurang agamanya, perempuan lebih baik shalat dirumahnya dari pada di masjid, menjadikan perempuan semakin

---

<sup>16</sup> Dalam beberapa hal yang tak tampak secara tekstual politik gender pada suatu masa, bagaimanapun, terekam dalam berbagai produksi tekstualnya dalam bentuk sebuah ideology gender implicit dan eksplisit. Semua penulis adalah sandera bagi masyarakat tempat mereka hidup. Orang-orang yang menciptakan berbagai teks dalam jaman Abbasiyah apa pun jenisnya, sastra atau hukum, tumbuh besar dengan mengalami dan menginternalisasi asumsi-asumsi masyarakat tentang gender dan tentang wanita serta struktur-struktur kekuasaan yang mengatur relasi antara wanita dengan pria, asumsi-asumsi dan struktur-struktur yang disandikan dan dimanifestasikan dalam berbagai transaksi kebiasaan hidup sehari-hari. Asumsi-asumsi semisal itu pada gilirannya terekam dalam teks-teks yang ditulis kaum pria dalam bentuk ucapan preskriptif tentang hakikat dan makna gender, atau diam-diam menginformasikan teks-teks mereka sekedar sebagai asumsi-asumsi tentang signifikansi wanita dan gender. (Dalam masa ini wanita bukanlah pencipta teks sebagaimana mereka alam zaman Islam kurun awal). Lihat: Ahmed, *Wanita.....*, hal. 102

dipojokkan dalam urusan domestik (rumah tangga) semata dan secara langsung maupun tidak langsung *ter-diskriminasi* dalam segala urusan yang nondomestik. Bahkan pendidikan yang semula menjadi hak dan bahkan kewajiban setiap muslim dalam pelaksanaannya ikut mengalami diskriminasi justru pada saat fiqh dirumuskan sehingga menjadi bagian dari masyarakat muslim.

### C. Berbagai Kendala Akses Pendidikan Perempuan

Di antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda, perempuan sering mengalami kendala dalam mengakses pendidikan. Banyak hal yang menjadi kendala bagi akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Secara garis besar kendala itu bisa dikelompokkan menjadi dua, yakni kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal berkenaan dengan budaya organisasi yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender. Kendala internal lainnya adalah kurangnya pemahaman tentang gender di kalangan personal sebuah lembaga. Mereka itu antara lain: pimpinan lembaga, perencana, staf serta *political will* dari pengambil keputusan.<sup>17</sup> Kendala internal ini lebih banyak dipengaruhi oleh gagasan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti: laki-laki superior perempuan inferior, laki-laki rasional perempuan emosional, laki-laki kuat, perempuan lemah, dan seterusnya. Pelabelan ini selanjutnya berimplikasi pada pembagian dunia ke dalam wilayah publik yang dikonotasikan untuk laki-

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Buku Panduan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bidang Pendidikan Islam*, ( Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2014), 34.

laki, dan wilayah privat untuk perempuan.<sup>18</sup> Berbagai perbedaan ini dikonstruksi secara kultural sehingga seolah-olah bersifat inheren, natural, dan kodrati.

Adapun kendala eksternal lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang masih bias gender, masih berlakunya budaya patriarkhis dan masih berkembangnya pandangan negatif (*gender steriotype*) bagi jenis kelamin tertentu.<sup>19</sup> Di antara pandangan negatif itu adalah anggapan bahwa kapasitas intelektualitas laki-laki lebih baik daripada kapasitas intelektualitas perempuan. Hal ini disinyalir berawal dari pengaruh yang kuat dari interpretasi-interpretasi bias gender ulama-ulama klasik. Upaya mereduksi dan mengeliminasi hasil-hasil interpretasi yang telah diajarkan dari generasi ke generasi di institusi-institusi pendidikan formal dan nonformal (pesantren) tidaklah mudah. Upaya itu berbenturan dengan fakta-fakta yang dilematis. Di satu sisi, interpretasi-interpretasi yang bias gender ini telah mendarah daging dalam jiwa masyarakat. Pada sisi yang lain, mengkritik karya-karya interpretasi ulama-ulama klasik dipandang sebagai sebuah kesalahan, atau bahkan pelecehan. Pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, dan pendapat-pendapat mereka dianggap sebagai sebuah kebenaran.

---

<sup>18</sup> Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terj. Hartian Silawat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 106.

<sup>19</sup> Ibid



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian lapangan ini bertempat di wilayah Tapal Kuda yang sering disebut dengan Wilayah Pandalungan. Daerah tapal kuda ini meliputi Jember, kota Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan sebagian wilayah utara dan selatan Banyuwangi. Istilah Pandalungan sendiri menyiratkan makna kehidupan sosial yang merupakan hasil asimilasi dua kultur yang dominan yakni Jawa dan juga Madura. Oleh karenanya etika sosial seperti tata krama, sopan santun atau budi pekerti orang-orang Pandalungan, berakar dari dua kebudayaan ini. Pada perkembangan selanjutnya budaya Pandalungan juga sangat sarat dengan nuansa Islam.<sup>1</sup>

Dikarenakan penelitian ini lebih di fokuskan pada akses perempuan di lembaga pendidikan tinggi, maka subyek penelitian ini adalah perempuan yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Adapun perguruan tinggi yang di pilih di sini di dasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Perguruan tinggi yang sudah mendapat pengakuan dari masyarakat yang berada di luar pondok pesantren, dalam hal ini adalah IAIN Jember, STAI At Taqwa Bondowoso.

---

<sup>1</sup> Pandalungan atau Pandalungan diambil dari akar kata *dalung* yang berarti periuk besar untuk memasak atau mematangkan berbagai menu. Pada perkembangannya Pandalunga adalah sebutan khas untuk masyarakat dan kuktur tapal kuda di Jawa Timur. Lihat: Dukut Imam Widodo, *Djember Tempo Doeloe*, (Jember: PT. JEPE PRESS MEDIA UTAMA, 2014), 201.

- b. Perguruan tinggi yang sudah mendapat pengakuan dari masyarakat di dalam pondok pesantren, antara lain Universitas Yudharta Pasuruhan, IAI Nurul Jadid Probolinggo, IAI Syarifudin Pasuruhan, INAIFAS Jember, IAI Ibrahimiyah Banyuwangi.
- c. Ma'had Aly, antara lain Ma'had Aly Syafi'iyah Sukorejo, Ma'had Aly Nurul Jadid Probolinggo, Ma'had Aly Nurul Qornoin Jember.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Untuk kepentingan akses perempuan terhadap Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ini digunakan model penelitian deskriptif tentang fenomena. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Tujuannya adalah menganalisis perubahan dalam fenomena sepanjang waktu, menganalisis signifikansi suatu fenomena bagi peristiwa di masa depan dan menganalisis antar bagian suatu fenomena.<sup>2</sup> Oleh karenanya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap realita yang terjadi pada perempuan. Strauss dan Corbin mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif memang dapat digunakan untuk mempelajari, membuka dan mengerti apa yang terjadi di belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui.<sup>3</sup>

Adapun desain yang digunakan adalah sebagaimana diungkapkan disajikan dalam bentuk *funnel* (cerobong). Funnel itu melukiskan proses

---

<sup>2</sup> Shulamit Reinharz, *Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial*, terjemahan oleh Lisabona Rahman, ed. Sita Aripurnami (Jakarta: Women Research Institute, 2005), 226.

<sup>3</sup> Ratna Saptari & Briigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kalyanamitra, 1997), 468.

penelitian yang berasal dari eksplorasi yang bersifat luas dan dalam, kemudian berlanjut dengan aktifitas pengumpulan data yang lebih menyempit dan terarah pada suatu topik tertentu, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis.<sup>4</sup> Selanjutnya penelitian kualitatif tersebut dilakukan dengan pendekatan fenomenologi yang lebih difokuskan pada pemahaman tentang respon atas kehadiran atau keberadaan manusia bukan sekedar pemahaman atas bagian-bagian yang bersifat spesifik atau perilaku khusus.<sup>5</sup>

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah para perempuan mahasiswa /mahasantri yang diambil dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Tapal Kuda. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada sumber-sumber pendukung teori tentang Islam dan Pendidikan, Bentuk-bentuk Kendala Pendidikan bagi Perempuan, dan berbagai teori lain yang relevan..

Adapun guna menjangkau data penelitian dilakukan secara serkuler dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu; (1) wawancara, (2) pengamatan dan (3) dokumentasi. Penggunaan wawancara dalam penelitian ini antara lain untuk menggali informasi mengenai hambatan-hambatan akses yang dirasakan perempuan dalam menempuh pendidikan, serta pengalaman mereka selama mengikuti kegiatan baik intra maupun ekstra di kampus. Keseluruhan data itu

---

<sup>4</sup> Bogdan, R.C., and Biklen, S.K.. *Qualitative Research for Education an Introduction to Theori and Methods*, (London: Allyn and Bacon. Inc. 1982), 59.

<sup>5</sup> Sudarwan, Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif.*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) , 52.

akan ditampilkan secara apa adanya menurut sudut pandang dan persepsi subyek itu sendiri.

Hasil wawancara dengan informan akan disajikan secara rinci dan apa adanya, sehingga, pendapat informan itu dapat dilihat dalam bentuk yang orisinal. Cara penyajian semacam ini dalam istilah antropologi disebut *emik*. Hal ini bukan berarti bahwa peneliti tidak diperbolehkan melakukan interpretasi atau analisa terhadap data yang ditemukan. Pendapat peneliti (*etik*) akan disajikan secara terpisah dari pendapat informan, sehingga tidak terjadi keaburan antara pendapat pengamat dengan yang diamati.<sup>6</sup>

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan model partisipasi pasif, yaitu dengan mendatangi individu yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>7</sup> Dalam hal ini observasi dilakukan terhadap kegiatan perempuan sehubungan kegiatan di kampus baik ekstra maupun intra. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini digunakan guna mengumpulkan catatan-catatan sejarah LPTKI, serta dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan fokus penelitian.

#### **D. Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam hal ini menggunakan teknik non probabilitas. Dengan demikian penentuan subyek penelitian tidak didasarkan pada rumus statistic, melainkan pada pertimbangan subyek penelitian dengan didasarkan pada

---

<sup>6</sup> Anas Saidi Machfud, *Makalah-makalah Metodologi Penelitian*. Tidak dipublikasikan, 2007.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 213

jangkauan dan kedalaman masalah yang diteliti. Penentuan informan dengan cara demikian ini disebut menggunakan model *Purposive*.<sup>8</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Sebagai penelitian fenomenologis, maka analisis datanya bersifat induktif. Dengan demikian peneliti akan berusaha menggali fenomena-fenomena yang terjadi pada subyek penelitian, kemudian menghubungkan fenomena yang beragam itu untuk membangun suatu teori.<sup>9</sup> Upaya untuk membangun teori baru itu dilakukan dengan mendialogkan fenomena lapangan dengan buku-buku literature, sehingga pada saat yang sama analisis data juga bersifat deduktif. Oleh karena itu peneliti banyak mengembangkan model berfikir reflektif (*reflective thinking*) dengan cara mengkompromikan data dengan kepustakaan dan begitu pula sebaliknya.

Analisis dalam penelitian ini juga menggunakan perspektif gender. Esensi penelitian berperspektif gender adalah berusaha mengungkap pengalaman laki-laki dan perempuan dan relasi gender sesuai dengan isu sentral yang perlu mendapat perhatian. Untuk itu diperlukan pendekatan subyektif untuk menggali makna yang ada. Pendekatan ini di dasarkan pada asumsi bahwa para perempuan merupakan subyek pendidikan yang menyadari dan memahami posisi kultural maupun struktural. Oleh karena itu pendekatan subyektif diperlukan guna

---

<sup>8</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & kualitatif*, ( Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu., 2006), 205.

<sup>9</sup> Sudarwan, Danim, *Menjadi Peneliti .....52*

memahami “pandangan dari dalam’ (*inside view*) tentang alasan-alasan yang mendasari praktik-praktik sosial yang diwujudkan.<sup>10</sup>

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Moser. Alasan penggunaan model analisis ini dikarenakan bisa memotret kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Proses analisis model Moser ini melalui tiga tahap:

1. Analisis Pola Pembagian Kerja untuk laki- laki maupun perempuan baik peran produktif, reproduktif, maupun sosial kemasyarakatan di tingkat keluarga. Melalui analisis pola pembagian kerja dalam keluarga akan memberikan gambaran sejauh mana laki-laki mengambil bagian peran domestik, dan sejauh mana perempuan mengambil bagian peran produktif.
2. Analisis profil akses (peluang) dan kontrol (kekuatan dalam pengambilan keputusan) yang berkaitan dengan sumberdaya fisik.
3. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profil kegiatan serta profil akses dan kontrol agar dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan hal-hal yang menghambat atau menunjang sebuah program.<sup>11</sup>

#### **F. Pengecekan keabsahan data**

Untuk menjamin kesahihan dan keabsahan data, peneliti berupaya menggunakan metode pengecekan keabsahan data temuan. Dalam penelitian ini

---

<sup>10</sup> Irwan Abdullah, *Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial*, Jurnal Humaniora, Volume 15, No. 2 Oktober 2001, 268.

<sup>11</sup> Moser, C.O.N. *Gender Planing and Development; Theory, Practice and Training*. (London: Routledge, 1993).

pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada kriteria-kriteria untuk menjamin kepercayaan data yang diperoleh melalui penelitian. Cara yang digunakan dalam menguji keabsahan data atau memeriksa kebenaran data adalah memperpanjang masa penelitian, pengamatan terus menerus, meningkatkan ketekunan, triangulasi baik triangulasi data maupun triangulasi teknik.

Pemeriksaan data pada penelitian ini mengikuti kriteria yang diajukan oleh Nasution. Yakni dengan menggunakan tiga tahap; orientasi, eksplorasi dan tahap member check. *Pertama*, tahap orientasi yang dilakukan pra survey ke lokasi penelitian (dalam hal ini para perempuan yang mengikuti pendidikan di LPTKI) untuk mendapatkan data gambaran tentang permasalahan yang diteliti. *Kedua*, tahap eksplorasi yang dilakukan dengan peneliti lapangan tentang kendala-kendala akses perempuan terhadap pendidikan, keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam kegiatan intra kurikuler kampus, keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam kegiatan intra kurikuler kampus. *Ketiga*, tahap member check. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan laporan tertulis ditujukan kepada informan guna menilai hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi. Setelah itu meminta kejelasan kepada unsur terkait bila dipandang perlu. Hal ini bertujuan agar seluruh data yang diperoleh dapat dijamin kualitasnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta:Erlangga, 2009), 151.





## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam

##### 1. Angka Partisipasi Perempuan di Lembaga Pendidikan Tinggi

Persoalan pendidikan bagi perempuan di Lembaga Pendidikan Tinggi sudah banyak menarik perhatian para peneliti, apalagi jika menyangkut perempuan muslim. Ini terkait kenyataan di kebanyakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, perempuan hampir selalu diposisikan sebagai “warga kelas dua”, sehingga hak-haknya sering diabaikan. Salah satunya hak perempuan terhadap pendidikan, seringkali dihadapkan pada hambatan yang tidak sederhana. Itulah sebabnya Barat menyebut Perempuan Muslim sebagai *the other*. Anggapan ini semakin menguat pasca-peristiwa 9/11.<sup>1</sup> Perempuan Muslim dianggap tertindas oleh budaya dan harus diselamatkan.<sup>2</sup>

Anggapan ini mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian terkait akses pendidikan bagi Perempuan Muslim. Di antaranya dilakukan oleh Sahu, Jeffery dan Nakkeeran yang menemukan bahwa Muslim dan Hindu di Bengaluru, India Selatan, menghadapi banyak hambatan dalam mengakses pendidikan.

---

<sup>1</sup> Ini adalah peristiwa pembajakan pesawat yang meruntuhkan menara kembar World Trade Center di kota New York, beserta serangkaian kejadian serupa lainnya pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa ini telah mengejutkan dunia dan menyisakan pandangan yang miring tentang Islam, dikarenakan adanya tuduhan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh sekelompok militan Muslim. Kejadian tersebut dikenal dengan peristiwa 11 September atau 11/9.

<sup>2</sup> Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa Islam adalah *a set of outdated traditions* atau seperangkat tradisi kuno, sehingga perlu dilakukan intervensi. (Lihat: Lila Abu-Lughod, *Do Muslim women really need saving?*, *American Anthropologist*, Vol. 104, No. 783, 2002, 90. Juga dalam Leila Ahmed: 1992; Mahmood: 2005).

Hambatan itu meliputi: finansial, keamanan di tempat umum, bias gender, isu-isu sosial dan dominasi keluarga dan masyarakat. Bagi Perempuan Muslim hambatan itu diperparah lagi dengan status mereka sebagai minoritas. Hal ini menunjukkan adanya hambatan *intersectional* yang kompleks (finansial, sosial, kultural, dan structural) bagi perempuan dalam mengakses Pendidikan Tinggi.<sup>3</sup>

Penelitian tentang komunitas Muslim minoritas juga dilakukan oleh Silverman, terhadap perempuan Muslim Romania di New York.<sup>4</sup> Temuan penelitian ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi dalam pendidikan perempuan Romania lebih tinggi dari pada laki-laki. Meski demikian bukan berarti pendidikan perempuan muslim Romania tanpa mengalami hambatan. Hambatan utamanya dalam hal mobilitas dan seksualitas para perempuan itu. Sebagai masyarakat pendatang, mereka dituntut untuk mempertahankan dan melestarikan budaya dan tradisi dari leluhur mereka. Tuntutan ini lebih banyak dibebankan kepada perempuan, sebab perempuan yang melahirkan generasi penerus para imigran. Itulah sebabnya para orang tua melarang anak perempuannya bergaul dengan warga non-Romania. Hal ini berdampak pada sempitnya ruang gerak perempuan dalam belajar.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Biswamitra Sahu, Patricia Jeffery & N. Nakkeeran, Barriers to Higher Education: Communalities and Contrasts in Experiences of Hindu and Muslim Young Women in Urban Bengaluru, *Compare: a Journal of Comparative and International Education*, Vol. 47. No. 2, 2019, 177-191.

<sup>4</sup> Komunitas ini merupakan generasi kedua para imigran dari Romania. Generasi pertama diperkirakan masuk ke Amerika antara tahun 1871 sampai 1960, dan bahkan masih berlanjut hingga hari ini. Kepercayaan yang mereka anut mayoritas Kristen, tetapi sebagian juga penganut Yahudi dan Islam. Mereka dikenal dengan komunitas Diaspora Romania, sebab mereka lahir dan berdarah Romania tetapi menetap di Amerika.

<sup>5</sup> Carol Silverman, Education Agency and Power Among Macedonia Muslim Romani Women in New York City, *Signs*, Vol. 38, No. 1, September 2012, 30-36.

Hambatan perempuan dalam mengakses pendidikan tinggi, juga terjadi hampir di semua negara Muslim, mengingat baru pada abad ke 19 sejumlah tokoh tampil untuk menyerukan dibukanya pendidikan bagi kaum perempuan. Rifa'ah Rafi' al- Thahthawi (1801-1873 M) dipandang sebagai orang pertama yang mengkampanyekan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu juga menyerukan dibukanya akses pendidikan yang sama bagi kaum perempuan.

Khusus di Indonesia perempuan baru mendapat posisi yang setara dalam pendidikan pesantren di awal abad ke 20, tepatnya sejak tahun 1910.<sup>6</sup> Adapun akses perempuan terhadap pendidikan formal sudah terbuka sejak kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri nomor 6 tahun 1975 yang memberi pengakuan pada Madrasah, sehingga lulusan Madrasah bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi Agama maupun Umum dan juga bisa pindah ke sekolah umum yang sederajat. Hal ini menguntungkan umat Islam terutama perempuan, karena secara historis partisipasi pendidikan perempuan di Indonesia awalnya lebih banyak hanya pada pendidikan Diniyah atau Madrasah yang pada mulanya belum diakui sebagai pendidikan formal. Dengan kebijakan tersebut, banyak perempuan bisa mengakses Pendidikan Tinggi formal kemudian bisa meningkatkan taraf hidup mereka, karena Pendidikan tinggi dipercaya sebagai tiket penting untuk mobilitas sosial dan jalan keluar dari kemiskinan.

---

<sup>6</sup> Sejak akhir tahun 1910 para Kyai telah menyediakan komplek pesantren untuk murid-murid perempuan, Pesantren Denanyar di daerah Jombang yang pertama kali membuka pesantren perempuan. Kemudian tahun 1920-an beberapa pesantren lain di antaranya Pesantren Tebuireng di Jombang dan Pesantren Singosari Malang, juga membuka pesantren perempuan. Lihat: Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 54.

Terbukanya akses pendidikan bagi perempuan ini menjadikan angka partisipasi perempuan di PTAI cukup tinggi. Kajian terhadap beberapa PTKI di Jawa Timur membuktikan adanya kecenderungan itu sejak beberapa tahun terakhir ini. Diantaranya sebagaimana pada tabel berikut ini:

**TABEL 2**  
**ANGKA PARTISIPASI MAHASIWA DI LPTKI**

NO	LPTKI	2016		2017		2018	
		lk	pr	Lk	pr	Lk	pr
1.	IAIN Jember	551	985	837	1435	537	1065
2.	INAIFAS Jember	144	114	147	132	108	166
3.	Universitas Yudharta Pasuruhan	311	314	311	314	357	320
4.	Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah	96	38	73	37	60	38
5.	Ma'had Aly Nurul Jadid	1	4	6	15	6	12
6.	Ma'had Aly Hasyim Al Asy'ari	20	12	28	27	39	24

Dari beberapa PTKI yang diteliti menampakkan kecenderungan tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam melanjutkan studinya di lembaga pendidikan tinggi. Bahkan partisipasi perempuan bisa lebih tinggi dari pada laki-laki, baik di kelompok Universitas Islam maupun di Ma'had Aly. Ini membuktikan bahwa akses perempuan untuk masuk ke lembaga pendidikan tinggi sudah terbuka lebar. Terbukanya akses pendidikan bagi perempuan ini nampaknya juga terjadi di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim.

Diantaranya terhadap perempuan muslim Iran, Alex Shams (2016) menemukan bahwa sejak revolusi Iran tahun 1979, perempuan secara berangsur memiliki keberanian untuk mempertanyakan bahkan memprotes pandangan-pandangan patriarkhis yang dibalut agama. Upaya ini membuahkan hasil berupa peningkatan akses perempuan dalam ruang publik, termasuk kesempatan dalam pekerjaan dan pendidikan. Bahkan sejak 2016 partisipasi perempuan muslim Iran di lembaga pendidikan tinggi mencapai 60%.<sup>7</sup> Penelitian Jamjoom dan Kelly (2013) menemukan fakta bahwa sejak tahun 1975, partisipasi perempuan meningkat menjadi 14% dari keseluruhan mahasiswa di Arab Saudi. Peningkatan pesat terjadi antara tahun 1990 sampai 2004 sebesar 51,2%. Berikutnya di tahun 2013, perempuan mencapai 60% dari keseluruhan mahasiswa di negara tersebut.<sup>8</sup>

Penting di catat disini bahwa tinggi rendahnya partisipasi perempuan di beberapa perguruan tinggi itu terkait dengan kompetensi lulusan yang dihasilkan. Ini sangat terlihat di perguruan tinggi kelompok Universitas Islam. Misalnya di IAIN Jember, meskipun secara umum partisipasi perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki, ternyata ada beberapa program studi (prodi) yang menunjukkan kebalikannya, yakni Program Studi Ilmu Hadits, Ahwal Al Syahsiah, dan Hukum Tata Negara.<sup>9</sup> Hal yang sama juga terjadi di INAIFAS, terdapat kesenjangan

---

<sup>7</sup> Alex Shams, Revolutionary Religiosity and Women's Access to Higher Education in the Islamic Republic of Iran, *Journal of Middle East Women Studies*, [March 2016: 12 (1)], 126-138.

<sup>8</sup> Jamjoom, dan Kelly, Higher education for women in Saud Arabia, dalam Larry Smith dan Abdurrahman Abouammoh (editors), *Higher Education in Saudi Arabia: Achievements, Challenges and Opportunities*, (New York: Springer, 2013).

<sup>9</sup> Lembaga pendidikan tinggi kelompok Universitas Islam ini lazimnya terdiri atas beberapa fakultas, dan masing-masing fakultas terbagi atas beberapa program studi. Program studi ini menawarkan seperangkat pengetahuan, sikap dan ketrampilan untuk mendukung kompetensi lulusan, agar siap diterima di dunia kerja. Di IAIN Jember misalnya terdapat 27 program studi dari

partisipasi laki-laki dan perempuan di prodi Ahwal Al Syahsiyyah.<sup>10</sup> Prodi-prodi tersebut bertujuan mempersiapkan para pakar hadits, pakar hukum Islam, maupun hakim. Sebuah profesi yang hampir selalu diidentikkan dengan laki-laki. Sebaliknya bagi prodi yang bertujuan untuk menyiapkan lulusan di bidang keguruan, bimbingan konseling, dan perbankan selalu dipenuhi oleh mahasiswi. Profesi-profesi ini seakan diidentikkan dengan perempuan.

Gambaran yang serupa juga nampak di kelompok Ma'had Aly. Sebagai lembaga yang bertujuan untuk mempersiapkan ahli-ahli agama, Ma'had Aly hampir selalu identik dengan laki-laki. Di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo mahasantri dipersiapkan untuk menjadi pakar dibidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Mereka akan bertanggung jawab untuk membuat keputusan hukum Fiqh berdasarkan realitas zaman yang selalu berubah. Tugas itu seakan menjadi tanggung jawab laki-laki, sehingga jumlah mahasantri *banin* nyaris dominan di lembaga tersebut. Begitupun yang terjadi di Ma'had Aly Hasyim al Asy'ari yang bertujuan untuk menyiapkan ulama yang ahli di bidang hadits.

---

lima fakultas yang ada. Di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terdapat 10 prodi antara lain: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika, Tadris Biologi, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Pada Fakultas Syariah terdapat empat prodi yakni al Akhwal al Syahsiyyah, Muamalah, Hukum Tata Negara (Syiyasah) dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). Di Fakultas Dakwah terdapat lima prodi yakni Kepenyiaran dan dakwah Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Bimbingan dan Konseling Islam, Manajemen Dakwah dan psikologi Islam. Di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora terdapat empat prodi yakni Ilmu Al Quran dan Tafsir, Ilmu Hadits, Bahasa dan Sastra Arab, dan Sejarah peradaban Islam. Terakhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdapat empat prodi yakni Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Manajemen Zakat dan Wakaf, dan Akuntansi Syariah.

<sup>10</sup> Di INAFAS terdapat enam prodi yakni Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, al Akhwal al Syahsiyyah, Ekonomi Syariah, dan Bimbingan Konseling Islam.

Bidang ini seperti menjadi dunia laki-laki, karena banyak besinggungan dengan aspek hukum yang di anggap menjadi otoritas laki-laki.

Kondisi yang berbeda di Ma'had Aly Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, yang memfokuskan kajian pada Muamalah dan ilmu falaq. Di sini jumlah mahasantri *banat* lebih banyak daripada *banin*. Bidang muamalah ternyata kurang menarik minat mahasantri *banin*. Ini dikarenakan bidang ini tidak bersentuhan langsung dengan persoalan hukum, melainkan lebih banyak pada persoalan sosial kemasyarakatan, bimbingan keluarga sakinah, dan pembinaan masyarakat. Tugas ini dalam banyak hal dikonotasikan dengan perempuan. .

Dapat dikatakan bahwa pemilihan prodi di lembaga pendidikan tinggi, masih dipengaruhi oleh gagasan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti: laki-laki superior perempuan inferior, laki-laki rasional perempuan emosional, laki-laki kuat, perempuan lemah. Laki-laki identik dengan maskulinitas perempuan feminitas. Meskipun di kalangan mahasiswa pandangan-pandangan tradisional ini banyak dipertanyakan, dan diperdebatkan, tetapi ternyata tidak bisa sepenuhnya ditolak. Pada kenyataannya nilai-nilai itu mempengaruhi pendidikan profesional, membatasi keterlibatan perempuan ke dalam bursa tenaga kerja, kondisi pekerjaan, dan jenis pekerjaan yang terbuka untuk mereka.<sup>11</sup>

Itulah sebabnya meski secara umum partisipasi perempuan terhadap pendidikan cukup tinggi, masih terdapat hambatan bagi perempuan untuk mengakses pendidikan dengan keahlian tertentu. Hal ini sangat nampak pada

---

<sup>11</sup> Julia Cleves Mosse, *Half the World, Half a Chance, an Introduction to Gender Development*, (Oxford: Oxfam, 1993), 92.

partisipasi perempuan di Universitas Yudharta Pasuruhan.<sup>12</sup> Sisi maskulin dan maskulin sangat nampak pada pilihan prodi mahasiswa Yudharta. Di Fakultas Teknik, dan Teknologi Pangan dan Industri sangat didominasi oleh mahasiswa laki-laki. Ini kebalikan dari Fakultas Ilmu Administrasi dan Fakultas Keguruan yang lebih banyak didominasi oleh perempuan. Bisa dikatakan peran dan fungsi gender masih sangat berpengaruh pada angka partisipasi perempuan terhadap pendidikan tinggi.

## **2. Keberlangsungan Pendidikan Perempuan di Lembaga Pendidikan Tinggi**

Berbicara tentang keberlangsungan pendidikan perempuan di PTKI, terdapat kecenderungan yang berbeda antara kelompok Universitas Islam dan Ma'had Aly. Di kelompok Universitas Islam perempuan jauh lebih mudah melangsungkan pendidikannya dari pada di Ma'had Aly. Bahkan kecenderungan yang terjadi jumlah peserta judisium perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Misalnya di INAIFAS, jumlah peserta yudisium tahun akademik 2017/2018 lebih banyak perempuan yakni 110 mahasiswi dan 104 mahasiswa. Hal yang sama juga terjadi di Universitas Yudharta, peserta yudisium tahun akademik 2017/2018 lebih banyak perempuan yakni sebanyak 199 mahasiswi, dan 143 mahasiswa.

---

<sup>12</sup> Berbeda dengan IAIN Jember dan INAIFAS Jember yang masih didominasi subyek agama sebagai bahan kajiannya, maka di kampus Yudharta justru didominasi subjek profan. Dari 16 prodi yang ada hanya empat yang memfokuskan kajian di bidang agama yakni prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Ekonomi Syariah, Ilmu Al Quran dan Tafsir. Selebihnya adalah prodi-prodi dengan bidang kajian non-agama, di antaranya: Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, Agribisnis, Ilmu dan Teknologi Pangan, Ilmu Komunikasi, Psikologi, Teknik Industri, Teknik Informatika, Teknik Mesin, Teknik Sipil dan Teknologi Hasil Perikanan



Keadaan ini sangat berbeda dengan PTKI kelompok ma'had yang menunjukkan perbedaan angka yang cukup tajam antara peserta yudisium laki-laki dan perempuan. Sebagaimana di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo pada tahun akademik 2016/2017 peserta yudisium laki-laki sebanyak 96 mahasantri, jauh di atas peserta perempuan yang hanya 54 mahasantri.<sup>13</sup> Jumlah ini memang sebanding dengan jumlah peserta *munaqasyah* (ujian akhir) pada tahun tersebut. Jumlah mahasantri *banin* yang mengikuti ujian akhir sebanyak 106. Dari jumlah ini 33 (31 persen) peserta dinyatakan lulus, 10 (9,4 persen) peserta tidak lulus dan sisanya sebanyak 63 (59,6 persen) peserta harus melakukan ujian ulang. Adapun peserta *banat* sebanyak 54, yang dinyatakan lulus 9 (16,7 persen) mahasantri, 7 (13 persen) dinyatakan tidak lulus, dan sisanya sebanyak 38 (70,3 persen) peserta harus mengulang.

Perbedaan kecenderungan peserta yudisium di kelompok Universitas Islam dan Ma'had Aly ini lebih banyak dipengaruhi iklim akademik yang berbeda antara kelompok universitas dan kelompok ma'had. Iklim akademik di universitas memberikan ruang gerak bagi perempuan lebih leluasa dari pada di ma'had. Perempuan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dengan laki-laki di universitas, sehingga mereka bisa bebas berdiskusi dan menggali informasi dari siapa pun dan kapan pun mereka mau. Dalam situasi akademik seperti ini

---

<sup>13</sup> Di antara tiga Ma'had Aly yang diteliti hanya Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah yang sudah memiliki alumni, sebab lembaga ini sudah mendapat pengakuan pemerintah sejak tahun 1990. Ma'had Aly Hasan Al Asy'ari mendapat pengakuan dari pemerintah sejak tahun 2016, sedang Ma'had Aly Nurul Jadid sejak tahun 2018.

memberi peluang bagi perempuan untuk meraih prestasi setinggi mungkin, dan bahkan bisa melebihi laki-laki.<sup>14</sup>

Sementara iklim akademik di Ma'had Aly sangat jauh berbeda, terutama yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren. Sebagaimana di Ma'had Aly Syafi'iyah Salafiyah, Ma'had Aly Nurul Jadid dan Ma'had Aly Hasyim al Asy'ari mahasantri *banat* dan *banin* di tempatkan dalam kelas yang berbeda (tersegregasi). Ini berimplikasi pada perbedaan perlakuan antara mahasantri *banin* dan *banat*. Kondisi ini menyulitkan perempuan,

Kesulitan lain yang di hadapi mahasantri *banat* adalah larangan menikah bagi mahasiswa selama menempuh studi di ma'had, sebagaimana diberlakukan di Ma'had Aly Hasyim al Asy'ari. Ini yang menyebabkan sebagian besar alasan berhenti kuliah dikarenakan menikah. Walaupun di Ma'had Salafiyah Syafi'iyah dan Nurul Jadid tidak ada larangan khusus bagi mahasantri yang menikah, tetapi alasan ini juga menjadi penyebab utama mahasantri *banat* menghentikan studinya di Ma'had Aly.

Perbedaan iklim akademik, dan juga perbedaan perlakuan terhadap perempuan antara PTKI kelompok Universitas Islam dan Ma'had Aly, disebabkan perbedaan interpretasi tentang kesetaraan gender antara kelompok universitas dan kelompok ma'had. Ini membenarkan kesimpulan penelitian McClendon (2018) tentang status perempuan di dunia Muslim dan peran penting Islam, bahwa saat

---

<sup>14</sup> Sebagaimana terjadi di Fakultas Teknik Universitas Yudharta kebanyakan peserta yudisium terbaik adalah mahasiswi, meskipun partisipasi perempuan di fakultas ini lebih rendah daripada laki-laki. Di Prodi Teknik Sipil Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi di pegang oleh Putri Ana (3,69), berikutnya Fidah Dewi Arini (3,60) dan Zakqiyatul Aghniya (3,51). Adapun di Prodi Teknik Industri IPK tertinggi diraih oleh Ridlo Maulana (3,53), berikutnya Kasid (3,51), dan Enik Sulistyowati (3,50).

ini tidak ada lagi pertentangan antara masyarakat Muslim (terutama di negara-negara kaya) dan Barat dalam hal kesetaraan gender di dunia pendidikan. Diakui bahwa Muslim bukanlah kelompok yang monolitik dan bahwa Islam itu memiliki tradisi keagamaan yang bervariasi dan terbuka terhadap interpretasi serta pendekatan yang berbeda-beda terhadap kesetaraan gender.

#### **B. Akses Perempuan terhadap Kegiatan Intra dan Ekstra Kampus**

Iklim akademik yang berbeda di PTKI kelompok Universitas Islam dan Ma'had Aly juga berimplikasi pada akses perempuan terhadap kegiatan intra maupun ekstra kampus. Pada kelompok Universitas Islam perempuan memiliki akses yang lebih terbuka dari pada Ma'had Aly. Keterbukaan akses ini memungkinkan perempuan berpartisipasi secara leluasa dalam setiap kegiatan kampus tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Di kampus Universitas Yudharta perempuan diberi ruang sama luasnya dengan laki-laki, meskipun kampus ini berada di dalam Pondok Pesantren Ngalah Pasuruhan. Dengan demikian tidak ada hambatan sama sekali bagi perempuan untuk mengakses kegiatan intra maupun ekstra kampus. Di kampus ini pembelajaran dilakukan secara bersamaan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan (*co-education*). Hal ini selaras dengan visi Universitas Yudharta sebagai kampus multikultural. Visi multikulturalisme ini tidak saja ditanamkan dalam perkuliahan sebagai salah satu matakuliah dasar bagi mahasiswa, tetapi sudah menjadi landasan filosofis dan juga juridis dalam setiap kegiatan. Oleh karenanya perbedaan apa pun (baik agama, suku bangsa, jenis kelamin) adalah

kewajaran yang harus diberi ruang dan kesempatan yang sama untuk berkembang.<sup>15</sup>

Keterbukaan akses pendidikan bagi mahasiswa perempuan juga berlaku di INAIFAS. Sejak awal berdiri (tahun 1999) INAIFAS tidak memberlakukan *segregasi* dalam setiap aspek pendidikannya. Akan tetapi sejak tahun 2016 dilakukan pemisahan kelas antara laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa yang semakin banyak. Meski demikian tidak ada pembedaan perlakuan antara dua kelas tersebut. Bahkan pada kenyataannya dosen sering menjadikan satu kelas-kelas tersebut untuk efisiensi waktu dan tenaga.<sup>16</sup>

Pemisahan kelas di INAIFAS juga tidak menghalangi akses mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan ekstra kampus. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di kampus ini banyak diikuti oleh mahasiswa perempuan. Bahkan mahasiswi juga bisa bersaing bebas dalam pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Salah satunya berhasil terpilih menjadi ketua BEM periode 2014/2015 atas nama Yulia Putri Mandar, mahasiswa dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Interview* dengan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Asrul Anan pada tanggal 11 Juni 2020. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kaprogi Agribisnis Idah Lumhatul Fuad,

<sup>16</sup>Salah satu pertimbangan dosen melakukan penggabungan kelas adalah ketercapaian materi yang disesuaikan dengan alokasi waktu yang disediakan. Ini biasa dilakukan untuk mata kuliah yang membutuhkan waktu cukup lama bagi dosen untuk menuntaskannya. Sementara alokasi waktu satu jam pelajaran dengan durasi 90 menit dirasa masih sangat kurang. Itulah sebabnya dosen mengambil kebijakan dengan menggabungkan dua kelas itu dengan durasi waktu 2 kali 90 menit. *Interview* dengan Mislikhah, M. Sahlan, dan Qurratul Aini, dosen INAIFAS, tanggal 6 Juli 2020.

<sup>17</sup> *Interview* dengan Riska Miftahul Jannah, Fatimatuzzahrah dan Miftahul istiqomah, mahasiswa Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan INAIFAS Jember, tanggal 6 Juli 2020.

Hal yang sama juga terjadi di kampus IAIN Jember yang memberikan akses sangat terbuka bagi mahasiswi. Dalam setiap kegiatan perkuliahan dosen tidak pernah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap mahasiswi. Dalam diskusi sekalipun dosen memberi kesempatan mahasiswi untuk presentasi di depan mahasiswa, dan begitu pun sebaliknya. Ruang diskusi terbuka bagi siapa pun, baik untuk bertanya, menjawab dan bahkan berdebat. Dalam banyak forum diskusi mahasiswi bahkan lebih banyak berpartisipasi dari pada mahasiswa.<sup>18</sup>

Gambaran keterbukaan akses perempuan dalam kegiatan intra dan ekstra kampus di tiga perguruan tinggi kelompok Universitas Islam, menunjukkan adanya penerimaan terhadap wacana-wacana baru di lembaga tersebut. Ini merupakan konsekuensi dari tugas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yakni sebagai lembaga dakwah (*social expectation*) di satu sisi, dan sebagai lembaga keilmuan (*academic expectation*) di sisi yang lain.<sup>19</sup>

Itulah sebabnya di lingkungan Universitas Islam tersedia ruang seluas-luasnya bagi proses pencarian dan pertukaran pandangan yang berbeda-beda. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa bangunan pengetahuan ke-Islaman—misalnya hadits, tafsir, fiqh, tasawwuf—pada dasarnya dibentuk dan dipengaruhi oleh masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang sesuai dengan konteks masyarakat pada waktu itu. Pengetahuan yang demikian itu selalu terbuka untuk

---

<sup>18</sup> Interview dengan Mahmudah, mahasiswa Prodi PAI IAIN Jember, 6 Mei 2020.

<sup>19</sup> Sebagai bentuk ekspektasi sosial PTKI hendaknya dapat memberikan warna dan pengaruh ke-Islaman pada masyarakat Islam secara keseluruhan. Pada saat yang sama PTAI juga diharapkan mampu mengembangkan dirinya sebagai pusat studi dan pengembangan Islam sebagai ekspektasi akademisnya. Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi*....161

diuji ulang, diteliti, direformulasi dan direkonstruksi pada setiap kurun waktu.<sup>20</sup> Untuk itu di lingkungan PTKI harus diciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ide-ide segar berkenaan dengan pengamalan dan aktualisasi ajaran-ajaran Islam. Salah satu ide segar yang banyak dikembangkan saat ini adalah adalah ide kesetaraan gender.

Kesetaraan gender sesungguhnya tidak saja menjadi wacana di kampus, tetapi sudah menjadi bagian dari isu pembangunan nasional. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. *Gender Mainstreaming* merupakan salah satu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Program ini sengaja diciptakan untuk mengintegrasikan isu-isu gender sebagai bagian yang tak terpisahkan pada perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.

Implementasi lebih lanjut dari regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Departemen Agama. Peraturan menteri ini menjadi dasar bagi setiap lembaga di bawah Kementerian Agama untuk mengimplementasikannya dalam program kerja masing-masing.<sup>21</sup> Sebagai bagian dari lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama,

---

<sup>20</sup> Amin Abdullah, *Islamic Study di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 55.

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam, *Modul Pelatihan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bidang Pendidikan Islam*, Jakarta: Kemenag RI, Dirjend Pendis, (2016: 9).

PTKI bertanggung jawab untuk mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan kampus.

Pengarusutamaan Gender sesungguhnya juga menjadi wacana yang banyak dikembangkan di PTKI kelompok ma'had, meski dengan ruang interpretasi yang sedikit berbeda dengan kelompok universitas. Di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo implementasi PUG dilakukan dengan memberikan akses yang sama bagi perempuan untuk menuntut ilmu di lembaga tersebut. Pendiri pondok pesantren KHR. As'ad Syamsul Arifin sangat menaruh perhatian pada pendidikan perempuan, bahkan salah satu istri beliau Ny.Hj. Umi Khoiriyah, menuntut ilmu sampai tingkatan paling tinggi (S3) dan sekarang menjadi dosen di Ma'had Aly.

Meski akses bagi perempuan sangat terbuka lebar, tetapi tingkat partisipasi perempuan di lembaga ini masih sangat rendah dibanding laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah proses seleksi yang terlalu sulit bagi calon mahasantri *banat*. Itulah sebabnya sejak satu tahun terakhir ini diadakan lembaga *i'dadiyah* (semacam kelompok belajar) untuk mempersiapkan calon-calon mahasantri *banat* agar bisa menembus seleksi penerimaan mahasantri ma'had.<sup>22</sup>

Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah juga melakukan pemisahan yang ketat antara mahasantri *banin* dan *banat*.<sup>23</sup> Pemisahan itu dilakukan mulai dari pengaturan

---

<sup>22</sup> Interview dengan Ning Sari, tanggal 16 Juli 2020.

<sup>23</sup> Penyelenggaraan pendidikan dengan model terpisah ini sudah menjadi ketetapan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Bondowoso sejak diawal didirikan oleh KHR. As'ad Syamsul Arifin. Tujuannya untuk mencegah santri dari perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai akhlaq. Almarhum KHR. As'ad pernah berpesan: "Saya lebih memilih kehilangan uang daripada kehilangan akhlaq. Kalau kehabisan uang kalian bisa menjual *songkok* (peci) saya". Pesan ini di pegang terus oleh generasi penerus beliau, sehingga ampai kapan pun di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo akan tetap diberlakukan manajemen yang terpisah antara laiki-dan perempuan. Interview dengan Ning Sari, cucu perempuan Almarhum KHR. As'ad Syamsul

ruang asrama, ruang administrasi, penyelenggaraan pendidikan, sampai jalur mobilisasi mahasantri.<sup>24</sup> Model pendidikan yang terpisah ini sering menyulitkan mahasantri perempuan, dikarenakan bagi perempuan diberikan peraturan yang lebih ketat dari pada laki-laki. Salah satunya akses ke perpustakaan bagi mahasantri *banat* tidak seleluasa bagi *banin*, sebab perpustakaan ada di kampus yang berada di asrama laki-laki. Kalau mahasantri *banat* akan ke perpustakaan, terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Bagian Keamanan Putra agar mahasantri *banin* dikondisikan untuk tidak berada di sekitar ruang perpustakaan tersebut. Selain itu kendala akses juga dirasakan ketika mahasantri ingin melakukan studi banding, melakukan penelitian, dan menggali pengetahuan di luar pesantren, ijin bagi mahasantri *banat* juga sulit untuk diperoleh.<sup>25</sup> Tetapi dengan kendala-kendala itu sama sekali tidak menyurutkan semangat mahasantri *banat* untuk menjadi yang terbaik.

Untuk kegiatan ekstra kampus bagi mahasiswa *banat* juga dilakukan secara terpisah dengan mahasiswa *banin*. Mereka memiliki forum diskusi (*tanwir*) yang khusus untuk membahas masalah-masalah fiqhiyah di masyarakat. Sebagian besar hasil diskusi di forum itu nantinya akan diterbitkan dalam buku kompilasi hukum Islam yang diberi judul *Tanwirul Afkar*. Meskipun forum *tanwir* diselenggarakan untuk kelompok mahasantri *banin* dan *banat*, tetapi tulisan-tulisan yang dimuat di *Tanwirul Afkar* sebagian dari santri *banat*. Ketiadaan penulis

---

Arifin, yang diperkuat *interview* dengan Abdul Djalal, dosen Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah pada tanggal 16 Juli 2020.

<sup>24</sup> Pemisahan antara santri laki-laki dan santri perempuan di pondok pesantren ini sangat ketat. Bahkan bagi santri perempuan diberikan lorong khusus, dan mereka tidak boleh keluar selain melalui lorong itu. Diseberang lorong tersebut banyak berdiri Bagian Keamanan untuk mengawasi santri perempuan.

<sup>25</sup> *Interview* dengan Nabalah dan Eva mahasantri Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah, pada tanggal 16 Agustus 2020.



perempuan dalam *tanwirul afkar* akibat dari terbatasnya penulis perempuan dari mahasantri *banat*.

Berbeda dengan pengalaman mahasantri *banat* di Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah, di Ma'had Aly Nurul Jadid akses bagi perempuan relatif lebih terbuka. Meskipun di ma'had ini juga diterapkan pola pendidikan yang terpisah, tetapi ruang kuliahnya jadi satu. Kebetulan ruang kuliah itu berada di asrama santri perempuan. Ma'had Aly Nurul Jadid juga menerima calon mahasantri dari berbagai tingkat kemampuan membaca kitab. Oleh karenanya terdapat tiga penggolongan dalam kelas Ma'had Aly, yakni kelas *tamhid* (kelas pemula) bagi yang sudah bisa membaca Al Qur'an dan bisa menulis *pego*.<sup>26</sup> Selanjutnya tingkat *I'dadiyah* (bagi yang sudah bisa membaca kitab kuning tetapi belum terlalu mahir), dan terakhir tingkat Ma'had Aly.<sup>27</sup> Dengan dibukanya tiga tingkatan ini memudahkan akses perempuan untuk menjadi mahasantri, sehingga sampai saat ini mencapai 110 mahasantri *banat* dan 90 mahasantri *banin*, mulai dari tingkatan *tamhid I'dadiyah* dan *Ma'had Aly*. Meskipun pada akhirnya yang sampai ke tingkat Ma'had Aly tidak mencapai 100 persen dari keseluruhan mahasantri tersebut.<sup>28</sup>

Akses terhadap fasilitas kampus juga cukup terbuka bagi mahasantri *banat*. Mereka bebas untuk mengakses perpustakaan, karena perpustakaan

---

<sup>26</sup> Tulisan ini berasal dari huruf Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa, dan juga Bahasa Sunda.

<sup>27</sup> *Interview* dengan Ny. Latifah, Pengasuh dan dosen Ma'had Aly Nurul Jadid Probolinggo, tanggal 6 Agustus 2020.

<sup>28</sup> Kebanyakan yang tidak mencapai tingkat Ma'had Aly dikarenakan mereka juga kuliah di Universitas Nurul Jadid (UNUJA). Seringkali mereka terpaksa untuk memilih salah satu.

diletakkan di satu gedung yang diberi pembatas (*satir*) untuk memisahkan mahasantri *banin* dan *banat*. Perpustakaan ma'had juga di kompleks asrama putri, tetapi ada jalur khusus untuk masing-masing mahasantri *banin* dan *banat* untuk mengakses perpustakaan tersebut. Mahasantri *banat* juga sering dilibatkan dalam forum-forum diskusi (*bahtsul masail*) dengan mahasantri *banin*. Bahkan dilakukan kompetisi di antara dua kelompok tersebut.<sup>29</sup>

Kendala yang paling sering mereka hadapi adalah keterbatasan akses untuk berdiskusi dengan dosen laki-laki, dikarenakan jarak asrama putri yang terlalu jauh dengan asrama putra, tempat para dosen berada. Hal ini yang membedakan dengan mahasantri laki-laki yang secara bebas bisa bertanya dan berdiskusi dengan dosen kapan pun mereka mau. Kendala lain adalah ketika ada praktik Falaq untuk *Ruqyatul Hillal* (melihat bulan untuk penentuan awal bulan Qomariyah), ini mengundang *masyaqah* (kesulitan) tersendiri bagi mahasantri *banat*, karena mereka digabungkan dengan mahasantri *banin*, sehingga mereka sulit untuk berkonsentrasi.<sup>30</sup>

Akses pendidikan bagi mahasantri *banat* di Ma'had Aly Hasyim Al Asy'ari juga sangat berbeda dengan dua Ma'had Aly sebelumnya. Ma'had Aly Hasyim Al Asy'ari didirikan sejak tahun 2006 oleh KH. Yusuf Hasyim. Semula lembaga ini hanya khusus menerima mahasantri laki-laki, tetapi sejak tahun 2008 menerima mahasantri perempuan, dan menggunakan model pembelajaran bercampur antara *banin* dan *banat*. Pembelajaran terpisah baru dilakukan sejak 2015, sehingga saat ini semester I dan semester III kelasnya terpisah, sedangkan

---

<sup>29</sup> Interview dengan Rara tanggal 6 Agustus 2020..

<sup>30</sup> Interview dengan Fatimah tanggal 6 Agustus 2020..

semester V masih bercampur antara mahasantri *banin* dan *banat*. Akan tetapi dalam kondisi tertentu pembelajaran tetap dicampur tanpa harus diberi penghalang satir.<sup>31</sup>

Perkuliahan dilakukan di gedung yang sama tetapi kelasnya terpisah antara *banin* dan *banat*. Pada hari yang sama jam perkuliahan diatur secara bergantian antara kelas laki-laki dan perempuan. Mereka bisa bertemu dan berkomunikasi dengan leluasa, baik di kantor, di perpustakaan, bahkan di mushala kampus, karena semua fasilitas digunakan secara bersama. Bagi mahasantri juga tidak ada larangan untuk membawa alat komunikasi sehingga memudahkan mereka untuk mengakses pengetahuan kapanpun dan dari sumber mana pun.<sup>32</sup>

Pemberian akses yang sama antara laki-laki dan perempuan ini di dasarkan pada penafsiran secara berimbang dari ayat tentang superioritas laki-laki di satu sisi dan ayat yang mengandung perintah untuk memperlakukan perempuan dengan baik.<sup>33</sup> Pembatasan ruang gerak yang terlalu ketat bagi perempuan juga tidak dilakukan sebab benteng keimanan dan hati nurani jauh lebih efektif dari pada benteng dalam bentuk fisik. Ma'had Aly Hasyim Al Asy'ari memberi kepercayaan lebih bagi para mahasantrinya untuk menjaga akhlak dan pergaulan dengan lawan jenis tanpa harus diberi peraturan yang terlalu tegas.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Interview dengan ustadz Fauzi dan Rabiatal Adawiyah, , tanggal 16 Agustus 2020.

<sup>32</sup> Interview dengan Rafiqatul Anisah, tanggal 16 Agustus 2020.

<sup>33</sup> itu ada dalam surat An Nisa ayat 34 di satu sisi dan An Nisa ayat 19 di sisi yang lain.

<sup>34</sup> Interview dengan KH. Syakir, Wakil I Mudir Ma'had Aly Hasyim al Asy'ari, tanggal 16 Agustus 2020

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dua kelompok PTKI memiliki kecenderungan yang berbeda dalam memberikan akses bagi pendidikan perempuan. Bagi PTKI kelompok Universitas Islam, akses bagi perempuan terbuka sangat lebar dikarenakan lembaga ini memberikan ruang interpretasi terhadap kesetaraan gender seluas mungkin. Adapun bagi PTKI kelompok Ma'had Aly, interpretasi terhadap kesetaraan gender masih harus menyesuaikan nilai kepatutan lokal yang sudah diyakini sebagai kebenaran di pondok pesantren tempat Ma'had Aly itu berada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin *Islamic Study di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 55.
- Abu-Lughod, Do Muslim women really need saving?, *American Anthropologist*, Vol. 104, No. 783, 2002.
- Ahmed, Laila. ***Wanita dan Gender dalam Islam Akar Historis perdebatan Moderan***. Terjemahan: M.S. Nasrulloh. Jakarta: Lentera, 2000.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004).
- al-Bantani, Muhammad B. Umar Nawawi *Uqud al Lujai fi Bayan Huquq al Zaujain*, (berbagai edisi). Lihat juga tinjauan dan analisis hadits kitab ini oleh Forum Kajian Kitab Kuning, *Ta'liqwa Takhrij Syarh Uqud al Lujain*, tt.
- Dhofier, Zamakhsyari *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982).
- Djajadiningrat-Nieuwenhuis, M., Ibuisme and Priyayization: Part to Power, In. E. Locher-Scolten & A. Niehof (Eds). *Indonesian Women in Focus*, (Dordrecht, The Netherlands: Foris Publication, Vol 127, 1987), 43-51.
- Janjoom, dan Kelly, Higher education for women in Saud Arabia, dalam Larry Smith dan Abdurrahman Abouammoh (editors), *Higher Education in Saudi Arabia: Achievements, Challenges and Opportunities*, (New York: Springer, 2013).
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam, *Modul Pelatihan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bidang Pendidikan Islam*, Jakarta: Kemenag RI, Dirjend Pendis, (2016: 9).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Perempuan Indonesia Tidak Lagi Miskin Ilmu*, Dipublikasikan Pada : Selasa, 25 April 2017, <https://www.kemenppa.go.id>
- Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Statistik Gender Tematik Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), 14.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly

Mosse, Julia Cleves. *Half the World, Half a Chance, an Introduction to Gender Development*, (Oxford: Oxfam, 1993), 92.

Sahu, Biswamitra Patricia Jeffery & N. Nakkeeran, Barriers to Higher Education: Communalities and Contrasts in Experiences of Hindu and Muslim Young Women in Urban Bengaluru, *Compare: a Journal of Comparative and International Education*, Vol. 47. No. 2, 2019, 177-191.

Shams, Alex Revolutionary Religiosity and Women's Access to Higher Education in the Islamic Republic of Iran, *Journal of Middle East Women Studies* , [March 2016: 12 (1)], 126-138.

Silverman, Carol, Education Agency and Power Among Macedonia Muslim Romani Women in New York City, *Signs*, Vol. 38, No. 1, September 2012, 30-36.